

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Indeks Pembangunan Manusia

1. Definisi Pembangunan Manusia

Definisi Pembangunan Manusia menurut UNDP (*United Nation Development Program*) adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Jika mengacu pada pengertian tersebut, maka penduduk menjadi tujuan akhir dari pembangunan, sedangkan upaya pembangunan merupakan sarana (*principal means*) untuk tujuan tersebut. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sisi manusianya, bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi.¹

Dari definisi yang diberikan oleh UNDP tersebut mencerminkan bahwa manusia dalam suatu wilayah selayaknya memiliki dan diberikan pilihan-pilihan yang luas dan dibutuhkan dukungan dari pemerintah guna memberikan sarana bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan mengambil keputusan sesuai dengan pilihan yang diambilnya. Paradigma tersebut memunculkan pilihan-pilihan yang lebih luas bagi masyarakat seperti kebebasan politik, ekonomi dan sosial serta kesempatan untuk menjadi lebih kreatif dan produktif sesuai dengan hak-hak manusia yang menjadi bagian dari paradigma tersebut.

¹ Devianti Patta, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan manusia di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010" (Skripsi: Universitas Hasanudin, 2011), 16.

Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan. Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :²

1. Produktivitas. Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.
2. Pemerataan. Penduduk harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.
3. Kesinambungan. Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.
4. Pemberdayaan. Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

² Devianti Patta, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan manusia di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010", 17.

Pembangunan manusia pada hakikatnya adalah memperluas pilihan bagi masyarakat dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan tiap-tiap anggota masyarakat sehingga pembangunan manusia dalam hal ini juga mencakup berbagai aspek lainnya yaitu selain aspek ekonomi terdapat pula aspek sosial, politik, budaya serta aspek lainnya untuk menjadikan manusia lebih produktif dalam berkegiatan. Dengan demikian paradigma pembangunan manusia mencakup dua sisi yaitu berupa informasi kapabilitas manusia seperti perbaikan taraf kesehatan, pendidikan dan keterampilan. Sisi lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas mereka untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial dan politik.³

2. Definisi Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu: (1) lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; (2) tingkat pendidikan, yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga); dan (3) tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP Rupiah).⁴

Salah satu alat ukur untuk menilai kualitas SDM di suatu negara adalah dengan menggunakan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM ini adalah suatu konsep

³ Setyo Budiantoro, dkk, *pembangunan Inkisif*, (Jakarta: LP3ES, 2012), 50.

⁴ <http://Simreg.Bappenas.go.id>. Diakses pada hari Sabtu, 07 Oktober 2017, jam 10.00.

yang diperkenalkan pertama kali oleh UNDP (*United Nations Development Programme*) pada tahun 1990, dimana konsep ini mencoba menggabungkan antara indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks daya beli.⁵

Adapun formula yang digunakan dalam menyusun IPM ini adalah sebagai berikut:

$$\text{IPM} = 1/3 (\text{indeks harapan hidup}) + 1/3 (\text{indeks pendidikan}) + 1/3 (\text{indeks daya beli})$$

Angka harapan hidup adalah perkiraan tingkat usia rata-rata yang akan dicapai oleh penduduk dalam periode waktu tertentu. Semakin baik kondisi perekonomian dan pelayanan kesehatan di suatu negara maka akan semakin tinggi pula angka harapan hidup masyarakat di negara tersebut.

Indeks pendidikan menggabungkan dua indikator utama, yaitu rata-rata lama bersekolah dan tingkat melek huruf. Semakin tinggi nilai kedua indikator ini maka akan semakin baik pula nilai indeks pendidikannya.

Sedangkan indeks daya beli merujuk pada standar hidup layak di suatu wilayah. Indeks ini menunjukkan berapa sesungguhnya tingkat kemampuan seseorang atau suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka mampu menjalankan kehidupan ini secara layak.

Skor IPM ini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati angka 1 semakin tinggi nilai IPM-nya dan semakin berkualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh suatu negara. Demikian pula

⁵ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti., *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 100-101.

sebaliknya. IPM ini oleh UNDP dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu:

1. *Very high Human Development Index*: untuk nilai IPM $\geq 0,800$
2. *High Human Development Index*: $0,700 \leq$ nilai IPM $< 0,800$
3. *Medium Human Development Index*: $0,550 \leq$ nilai IPM $< 0,700$
4. *Low Human Development Index*: nilai IPM $< 0,550$

Tabel 2.1

Nilai minimum dan maksimum dari setiap komponen IPM

Indikator Komponen	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Keterangan
Angka Harapan Hidup	25	85	Sesuai standar global (UNDP)
Angka Melek Huruf	0	100	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-rata Lama Sekolah	0	15	Sesuai standar global (UNDP)
Konsumsi per Kapita yang Disesuaikan	300.000	732.720	UNDP menggunakan pendekatan perkapita riil yang d disesuaikan

Sumber: BPS, Bappenas, UNDP (2004)

3. Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia

a) Indeks Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Perhitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program *Mortpark* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode *Trussel* dengan model West, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004 dalam BPS,2012). Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk perhitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun.

a) Indeks Pendidikan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan angka melek huruf. Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah memiliki bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.⁶

⁶ Harmawati Marhaeni, dkk, *Indeks Pembangunan Manusia*, (Jakarta: BPS, 2008), 5.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan untuk penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Perhitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, angka melek huruf juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf adalah 100 (seratus), sedangkan batas minimumnya 0 (nol). Nilai 100 menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, sedangkan nilai 0 mencerminkan kondisi sebaliknya.

b) Indeks Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.⁷

Rumus Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

⁷ Harmawati Marhaeni, dkk, *Indeks Pembangunan Manusia*, (Jakarta: BPS, 2008), 6.

$$\begin{aligned}
 C(I) &= C(i) && \text{jika } C(i) < Z \\
 &= Z + 2(C(i) - Z) (1/2) && \text{jika } Z < C(i) < 2Z \\
 &= Z + 2(Z) (1/2) + 3(C(i) - 2Z) (1/3) && \text{jika } 2Z < C(i) < 3Z
 \end{aligned}$$

dan seterusnya

Di mana:

$C(I)$ = Konsumsi per kapita riil yang telah disesuaikan dengan PPP/unit.

Z = Batas tingkat pengeluaran yang sudah ditetapkan sebagai Rp 547.500 per kapita pertahun atau Rp 1.500 per kapita per hari.

B. Kemiskinan

1. Definisi dan Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan tidak mudah untuk mengukurnya. Namun demikian, secara umum ada dua macam ukuran kemiskinan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.⁸

1. Kemiskinan absolut, dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin, atau sering disebut garis batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut, hal ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik, seperti makanan, pakaian dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Kesulitan dalam

⁸Subandi. *Ekonomi Pembangunan* (Bandung: Alfabeta, 2014), 79-80.

konsep kemiskinan absolut adalah dalam menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga oleh tingkat kemajuan suatu negara, dan berbagai faktor ekonomi lainnya.

2. Kemiskinan relatif, adalah orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya, maka orang tersebut masih dianggap miskin. Hal ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, dari pada lingkungan orang yang bersangkutan.

Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah. Konsep ini merupakan perbaikan dari konsep kemiskinan absolut, dan karena konsep kemiskinan relatif bersifat dinamis, maka kemiskinan akan selalu ada.

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang dihadapi oleh seorang individu dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual. Definisi ini memfokuskan kemiskinan pada ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam konteks Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) sebagai dasar pengukuran kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi

untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan) yang diukur dari sisi pengeluaran. Karena itu, berdasarkan pendekatan ini, konsep Garis Kemiskinan (GK) dibangun di atas dua pondasi utama, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain).⁹

Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) menyebutkan bahwa kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan bermartabat.¹⁰

⁹Mudrajad Kuncoro, *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah* (Jakarta: Erlangga, 2014), 236.

¹⁰Setyo Budiantoro, dkk, *Pembangunan Inklusif* (Jakarta: LP3ES, 2012), 352.

Tabel 2.2

Indikator Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS)¹¹

Parameter	Satuan
1. Pendapatan	Rp. 167.000/bulan/orang atau Rp. 5.500/hari/orang
2. Rumah	Kurang dari 8 m ² ; lantai tanah/bamboo; dinding bambu
3. Jamban/toilet	Tidak ada
4. Penerangan	Lampu teplok (minyak), tanpa listrik
5. Sumber air	Sumur/air hujan
6. Bahan bakar memasak	Kayu/minyak tanah
7. Makan	Maksimal dua kali/hari
8. Konsumsi	Daging/ayam/susu sebanyak satu kali/minggu
9. Asupan kalori	2.100/hari
10. Pakaian	Membeli satu pasang/tahun
11. Kesehatan	Tidak sanggup membayar biaya pengobatan puskesmas
12. Pendidikan tertinggi	Sekolah Dasar (SD)
13. Sumber penghasilan kepala rumah tangga	Kurang dari (<) Rp. 600.000/bulan
14. Tabungan	Tidak ada

¹¹Setyo Budiantoro, dkk, *Pembangunan Inklusif*, 352.

2. Jenis-jenis Kemiskinan

Kemiskinan dibagi menjadi dalam empat bentuk, yaitu:¹²

- 1) Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.
- 2) Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- 3) Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun dapat bantuan dari pihak luar.
- 4) Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

3. Indikator Kemiskinan

Pembicaraan mengenai kemiskinan bisa meliputi berbagai aspek. Kemiskinan sangat terkait dengan kepemilikan modal, kepemilikan lahan, sumber daya manusia, kekurangan gizi, pendidikan,

¹²Angga Tri Widiastuti, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah*” (Skripsi: Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2016), 7.

pelayanan kesehatan, pendapatan per kapita yang rendah, dan minimnya investasi.¹³

Indikator kemiskinan ada bermacam-macam yakni: tingkat konsumsi beras perkapita pertahun, tingkat pendapatan, tingkat kecukupan gizi, Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), dan tingkat kesejahteraan.¹⁴

Parameter kemiskinan tersebut dengan mengukur kemiskinan dari konsumsi beras per kapita per tahun, yaitu di bawah 420 kg bagi daerah perkotaan dan 320 kg di daerah pedesaan. Perbedaan ini dapat dipahami karena dinamika kehidupan yang berbeda antara keduanya. Penduduk di daerah perkotaan mempunyai kebutuhan yang relatif lebih beragam daripada daerah pedesaan sehingga memengaruhi pola pengeluaran. Biro Pusat Statistik memakai patokan angka per kapita pengeluaran Rp. 20.614,00 untuk penduduk kota dan Rp. 13.295,00 untuk penduduk desa, yang dihitung selama sebulan untuk mengukur penduduk miskin.

Berdasarkan ukuran pendapatan, kemiskinan dapat dibedakan dalam kemiskinan *absolut* dan kemiskinan *relatif*. Sedangkan berdasarkan pola waktu, dapat diteropong dari (a) *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun menurun; (b) *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan; (c) *seasonal poverty*, adalah kemiskinan musiman yang sering dijumpai seperti pada kasus nelayan dan pertanian tanaman pangan; dan (d) *accident poverty*, adalah kemiskinan yang tercipta karena adanya bencana alam, konflik dan kekerasan atau dampak dari

¹³ Erani Yustika Ahmad, *Perekonomian Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 25-31

¹⁴ Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, 80.

suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Seseorang dikategorikan miskin secara absolut, apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut, atau ketika jumlah pendapatannya tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolute tersebut. Sementara kemiskinan mutlak terkait dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang hidup secara layak. Dengan demikian, kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya.

Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan hidup. Sementara itu, kemiskinan kemiskinan relatif didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup sesuai dengan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan absolut ini umumnya disejajarkan dengan kemiskinan relatif, yang artinya adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat. Intinya, kesenjangan antara kelompok yang mungkin tidak miskin (karena memiliki tingkat pendapatan di atas garis kemiskinan) dan kelompok masyarakat yang relatif kaya. Dengan menggunakan ukuran pendapatan, keadaan ini dikenal sebagai ketimpangan distribusi pendapatan.

4. Kebijakan Pengurangan Kemiskinan

Pelaksanaan pembangunan tidak semata-mata diarahkan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga ditekankan pada peningkatan pemerataan pendapatan, yang pada gilirannya diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antar golongan penduduk dan mengentaskan kemiskinan. Dalam kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah dan sedang melaksanakan sekitar 69 program penanggulangan kemiskinan.¹⁵

Secara teoritis semakin banyaknya program penanggulangan kemiskinan menjadikan jumlah kemiskinan dapat ditekan serendah mungkin. Sistem pemerintahan desentralisasi juga memungkinkan pelayanan kepada masyarakat miskin semakin cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sayangnya, dari sejumlah hasil penelitian tentang program-program pengentasan kemiskinan, ternyata hasilnya masih sama dengan sebelum digulirkan program pengentasan kemiskinan tersebut.

Secara operasional, pemerintah telah menyalurkan dana melalui DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) serta sektoral. Melalui 14 bank umum pemerintah telah menyalurkan dana kredit bagi UKM (Unit Kegiatan Masyarakat) sebesar 32,5 triliun rupiah, dana tersalur 90% ke daerah, yang seharusnya membuka peluang dan akses bagi masyarakat miskin. Walaupun begitu, tampaknya usaha tersebut belum mencapai hasil optimal karena keterbatasan konsep pengurangan kemiskinan yang sesuai dengan

¹⁵ Ahmad Erani Yustika, *Perekonomian Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 27.

karakteristik masing-masing daerah.¹⁶ Sebelum ini, pemerintah juga sudah meluncurkan banyak program untuk mengurangi kemiskinan, misalnya (a) Inpres Desa Tertinggal (IDT) dengan tujuan menciptakan kesetaraan desa dan menciptakan lapangan pekerjaan; (b) inpres kesehatan dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan yang mudah dan murah untuk penduduk pedesaan; (c) inpres pendidikan bertujuan memberikan layanan pendidikan gratis untuk pendidikan dasar sampai menengah; dan (d) inpres obat-obatan yang bertujuan memberikan obat-obatan yang murah kepada masyarakat miskin.

Dalam rangka menerjemahkan paradigma baru yang memaklumkan bahwa “orang miskin merupakan aktor utama”, ada beberapa isu sentral yang menjadi fokus perhatian bagi upaya penanggulangan kemiskinan, yakni sebagai berikut:¹⁷

- a. Upaya penanggulangan kemiskinan harus bersifat *local specific*. Maksudnya bahwa penanggulangan kemiskinan harus dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat lokal sesuai dengan kondisi di daerah tersebut.
- b. Upaya penanggulangan kemiskinan dalam era otonomi daerah harus diikuti dengan perbaikan faktor produksi melalui (i) penetapan kebijakan “*land reform*” melalui peraturan daerah; (ii) terciptanya demokrasi ekonomi rakyat dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan; (iii) terbentuknya lembaga keuangan mikro untuk membiayai usaha ekonomi rakyat; dan (iv) perlunya partisipasi yang lebih proporsional bagi kaum wanita dalam

¹⁶ Ahmad Erani Yustika, *Perekonomian Indonesia*, 28.

¹⁷ Ahmad Erani Yustika, *Perekonomian Indonesia*, 29.

- pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pemantauan dari kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- c. Upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan ekonomi rumah tangga.
 - d. Program penanggulangan kemiskinan harus merupakan program pembangunan yang produktif dan memberi sumbangan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat miskin di tingkat akar rumput secara berkelanjutan dan dengan pendampingan yang intensif.
 - e. Agenda penanggulangan kemiskinan harus menjadi agenda nasional dengan dua area sasaran aksi, yakni (i) menciptakan kebijaksanaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin melalui upaya peningkatan pendapatan; dan (ii) meningkatkan pelayanan masyarakat yang efektif dan tepat menjangkau penduduk miskin.
 - f. Penanggulangan kemiskinan merupakan gerakan masyarakat yang dilakukan sendiri oleh masyarakat dan hasilnya untuk masyarakat penduduk miskin sebagai pelaku penanggulangan kemiskinan.
 - g. Dalam suasana demokratisasi dan desentralisasi, upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan tidak dapat lepas dari berbagai hal yang terkait, yaitu (i) terselenggaranya praktik pemerintahan yang baik (*good governance*); (ii) pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah; (iii) kerja sama (*partnership*) antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil (*civil society*) dalam penanggulangan kemiskinan; dan (iv) upaya pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada kekuatan setempat.
 - h. Strategi penanggulangan kemiskinan dalam era otonomi harus memenuhi syarat (i) sederhana agar mudah dipahami serta dapat

- menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat; (ii) *open menu*, dalam arti masyarakat lokal diberi ruang otonom untuk menentukan aktivitas ekonomi yang dibutuhkan; (iii) partisipasi yang menyeluruh, dalam arti pengelolaannya melibatkan *multistakeholder*; (iv) keterbukaan informasi agar masyarakat dapat mengetahui dan memberikan kontribusi, bahkan melakukan kompetisi; dan (e) pengelolaan program dan dana yang harus transparan.
- i. Operasional strategi penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan dengan menerapkan (i) koordinasi; (ii) katalisasi; (iii) mediasi; dan (iv) fasilitasi.

5. Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan dapat dilihat sebagai keadaan masyarakat dengan tingkat ekonominya masih lemah, dan ditambah dengan kebijakan pemerintah yang umumnya diarahkan untuk memecahkan permasalahan jangka pendek. Sehingga kebijakan tersebut belum berhasil memecahkan kelompok ekonomi rakyat bawah. Di samping itu juga pengaruh keadaan luar negeri, antara lain dari segi pendanaan pembangunan.¹⁸

Dengan demikian kemiskinan merupakan kondisi masyarakat yang tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam pemilihan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Di samping itu pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah tidak sesuai

¹⁸Subandi. *Ekonomi Pembangunan*. Hlm 77-78.

dengan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, sehingga manfaat pembangunan tidak menjangkau mereka. Oleh karena itu, kemiskinan dapat disebabkan karena sifat alamiah/*cultural*, yaitu masalah yang muncul di masyarakat bertalian dengan pemilikan faktor produksi, produktivitas dan tingkat perkembangan masyarakat itu sendiri. Di samping itu kemiskinan bisa disebabkan oleh masalah struktural, yaitu yang disebabkan oleh miskinnya strategi dan kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan.

Tiga penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi, yaitu: secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya *ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya* sehingga menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, kemiskinan muncul akibat perbedaan *kualitas sumber daya manusia*, kemiskinan muncul akibat *perbedaan akses dalam modal*. Ketika penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berakibat pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi mengakibatkan pada keterbelakangan, dan seterusnya.

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan penyebab individual atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab sub-budaya, yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi

orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktural sosial.

Sedangkan kemiskinan menurut Suharto (2009), paling tidak ada empat penyebab terjadinya kemiskinan. *Pertama*, faktor individual, di mana seseorang menjadi miskin karena faktor pribadinya, seperti cacat permanen yang menyebabkan ia menjadi miskin. *Kedua*, faktor sosial, di mana kemiskinan terjadi akibat diskriminasi sosial yang dilakukan. *Ketiga*, faktor kultural, di mana seseorang menjadi miskin karena perilaku buruknya, seperti malas bekerja dan berusaha. *Keempat*, faktor struktural, di mana kemiskinan terjadi akibat ketidakadilan sistem ekonomi. Orang yang menjadi miskin akibat dimiskinkan oleh sistem yang ada.¹⁹

Penyebab dan terjadinya penduduk miskin di negara yang berpenghasilan rendah adalah karena dua hal pokok yaitu rendahnya tingkat kesehatan dan gizi, dan lambatnya perbaikan mutu pendidikan.

Oleh karena itu, upaya pertama yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pemberantasan penyakit, perbaikan kesehatan dan gizi, perbaikan mutu pendidikan, pemberantasan buta huruf, dan peningkatan keterampilan penduduknya. Kelima hal itu adalah upaya untuk memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Apabila hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan segera, maka penduduk dapat menggunakan modal dengan lebih efektif, menyerap teknologi baru dan belajar dari kesalahannya. Apabila ini ditunjang dengan penyediaan fasilitas umum yang memadai, maka akan segera

¹¹ Edi Suharto. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. (Bandung: Alfabeta, 2009), 22.

dapat mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, tingkat pendidikan (termasuk keterampilan), tingkat kesehatan yang rendah dan terbatasnya fasilitas umum merupakan penyebab dari adanya kemiskinan.

Bank Dunia (*World Bank*) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari perspektif akses dari individu terhadap sejumlah aset yang penting dalam menunjang kehidupan, yakni aset dasar kehidupan (misalnya kesehatan dan ketrampilan/pengetahuan), aset alam (misalnya tanah pertanian atau lahan olahan), aset fisik (misalnya modal, sarana produksi dan infrastruktur), aset keuangan (misalnya kredit bank dan pinjaman lainnya) dan aset sosial (misalnya jaminan sosial dan hak-hak politik). Ketiadaan akses dari satu atau lebih dari aset-aset diatas adalah penyebab seseorang jatuh terjerembab kedalam kemiskinan.

6. Kemiskinan Menurut Perspektif Islam

a. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks yang sangat tidak dianjurkan oleh Islam. Islam melarang kepada umatnya untuk meninggalkan keluarganya dalam keadaan lemah dan miskin sesuai dengan firman Allah dalam QS. An Nisa' : 9 sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)

mereka.oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (QS. An Nisa’ : 9)²⁰

Kemiskinan merupakan sebuah konsep multidimensi yang sulit untuk didefinisikan secara tunggal. Banyak pakar dalam berbagai disiplin ilmu untuk mendefinisikannya.²¹

Kemiskinan dalam perspektif Islam sesungguhnya memiliki sedikit pemahaman yang berbeda dengan kemiskinan secara konvensional. Islam mendefinisikan kemiskinan kedalam dua kategori yaitu fakir dan miskin.²² Definisi fakir menurut mazhab Syafii dan Hambali yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sekali karena ada sebab khusus yang syar’i (uzur syar’i), seperti usia tua, serta sibuk dalam dakwah sehingga tidak sempat untuk mencari nafkah.²³ Seperti yang tercantum pada QS. Al Baqarah (273) :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا
فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ
بِسِيمَتِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا ۗ وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَالِمٌ

“(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah; sehingga dia tidak

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, Syamil Alquran dan terjemah perkata. PT. Sygma Examedia Arkanleema :Bandung, 2014, 78.

¹³ Irfan Syauqi Beik dan Dwi Arsyianti Laily, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 68.

¹⁴ An Nisaa’ Siti Humanira, “Kredit Berbasis Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan” (Studi Kasus : Grameen Bank, Bangladesh), *Jurnal The Moslem Planners*, 1, April-Mei : 2013

¹⁵ Irfan Syauqi Beik dan Dwi Arsyianti Laily., *Ekonomi Pembangunan Syariah*, hlm 72.

dapat berusaha di bumi; orang lain yang tidak tahu, menyangka mereka orang kaya karena mereka memelihara diri (dari minta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.”(QS. Al Baqarah : 273)²⁴

Sedangkan pengertian orang miskin menurut mazhab Syafii dan Hambali adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya meskipun ia memiliki pekerjaan dan penghasilan.²⁵ Hal ini didasarkan pada QS. Al Kahfi sebagai berikut:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا
وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٦﴾

“Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut, aku bermaksud merusaknya, karena dihadapan mereka ada seorang raja yang merampas setiap perahu.” (QS. Al Kahfi: 79)²⁶

Menurut Al Ghazali kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ketidakmampuan memenuhi apa yang tidak dibutuhkan bukan merupakan kemiskinan.²⁷ Al Ghazali membagi kemiskinan menjadi dua bagian yaitu kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan material dan kemiskinan yang berkaitan kebutuhan rohani atau spiritual. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat yang mengatakan bahwa

²⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, Syamil Alquran dan terjemah perkata, hlm 46.

¹⁷ Irfan Syauqi Beik dan Dwi Arsyianti Laily., *Ekonomi Pembangunan Syariah*, hlm 72.

²⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, Syamil Alquran dan terjemah perkata, 302.

²⁷ Nurul Huda. *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 23.

kemiskinan bukan hanya merupakan perampasan barang dan jasa, akan tetapi juga kurangnya kemiskinan dalam roh. Rehman juga berpendapat bahwa umat Islam dapat meningkatkan kehidupan rohani mereka dengan meningkatkan kehidupan material mereka. Selanjutnya, Chapra berpendapat bahwa Islam menjadi agama keseimbangan, telah memberikan penekanan yang sama pada kedua spiritual dan duniawi.

Dari definisi kemiskinan materiil, spiritual dan kemiskinan absolut diatas, maka telah dibentuk kuadran CIBEST.²⁸ Kuadran CIBEST terbagi menjadi empat bagian yaitu seperti pada gambar berikut dibawah ini:

Gambar 2.1
Kuadran CIBEST



Kuadran CIBEST membagi kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual kedalam dua tanda yaitu

²⁸Penamaan Kuadran CIBEST (*Center of Islamic Business and Economics studies*) ini karena kuadran ini dibentuk berdasarkan hasil penelitian Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah IPB pada tahun 2013 tentang konsep *Islamic Poverty Line*. Penelitian ini diketuai oleh Irfan Syauqi Beik dengan anggota peneliti Laily Dwi Arsyanti dan Muhamad Findi Alexandi, serta dibantu oleh asisten peneliti Busaid dan Ach Firman Wahyudi. Dalam buku *Ekonomi Pembangunan Syariah* edisi revisi:2016.

positif (+) dan negatif (-). Tanda (+) artinya rumah tangga tersebut mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik, sementara tanda (-) berarti rumah tangga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik. Dari tanda tersebut akan diperoleh empat kemungkinan yaitu tanda (+) pada pemenuhan kebutuhan material dan spiritual, tanda (+) pada salah satu kebutuhan saja apakah pada kebutuhan material atau spiritual saja, serta tanda (-) pada kedua kebutuhan material dan spiritual.²⁹

Empat kemungkinan inilah yang kemudian melahirkan empat kuadran. Pada kuadran pertama, rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan materiil dan spiritual sehingga pada keduanya adalah (+). Inilah kuadran kesejahteraan secara ekonomi produktif dan secara ibadah yang produktif.

Kemungkinan kedua adalah rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan spiritual (+) akan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan materiilnya (-) dengan baik. Rumah tangga yang direfleksikan oleh kuadran II ini adalah rumah tangga yang berada pada kategori kemiskinan materiil. Sebaliknya, pada posisi kuadran III, rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan materiil (+) tapi tidak mampu memenuhi kebutuhan spiritual (-). Maka kondisi rumah tangga demikian adalah miskin secara spiritual.

Kondisi terburuk terletak pada kuadran IV dimana kondisi rumah tangga yang tidak mampu memenuhi keduanya baik materiil maupun spiritual (-). Manfaat dari kuadran CIBEST ini adalah terkait

²¹ Irfan Syauqi Beik dan Dwi Arsyianti Laily., *Ekonomi Pembangunan Syariah*, 77.

dengan pemetaan kondisi keluarga atau rumah tangga, sehingga dapat diusulkan program pembangunan yang tepat.

b. Penyebab Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, kemiskinan timbul karena berbagai sebab struktural yaitu:³⁰

- a. Kemiskinan timbul akibat kejahatan manusia terhadap alam yang tidak mampu mengelolanya dengan baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al Mulk : 21 sebagai berikut:

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ، بَلْ لَجُوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾

“Atau siapakah Dia yang member kamu rezeki jika Allah menahan Rezeki-Nya sebenarnya mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri?(QS. Al Mulk : 21)³¹

- b. Kemiskinan yang timbul karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya terhadap kelompok yang lain (miskin) sebagaimana diterangkan dalam QS. Al Imron : 180 sebagai berikut:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

³⁰Retno Wuri, *Kemiskinan: Bagaimana Islam Memandangnya*, Jurnal The Moeslim Planners, Keluarga Mahasiswa Muslim Planologi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung, April-Mei 2013, 4.

³¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syamil Alquran dan terjemah perkata*, 563.

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Imron : 180)³²

Islam menegaskan bahwa kemiskinan tidak boleh terjadi karena faktor malas.³³ Justru Islam mengajarkan kepada kaum miskin untuk bersedekah meskipun dengan jumlah yang sangat sedikit. Seperti yang tercantum dalam QS. Al Imron: 134.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكِبَاطِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ
عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Al Imron : 134)³⁴

c. Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Islam

Dalam perspektif syariah, kemiskinan terjadi akibat perbedaan pendapatan sesungguhnya merupakan *sunatullah fil hayah*. Keberadaan kelompok masyarakat yang berbeda-beda penghasilan tidak bisa dinafikan oleh karena itu Islam tidak pernah berbicara untuk bagaimana untuk menghilangkan kemiskinan, akan tetapi bagaimana caranya

³²Kementerian Agama Republik Indonesia, Syamil Alquran dan terjemah perkata, 73.

³³Irfan Syauqi Beik dan Dwi Arsyianti Laily., *Ekonomi Pembangunan Syariah*, 73.

³⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, Syamil Alquran dan terjemah perkata, 67.

untuk mereduksi dan meminimalisir kemiskinan ini agar kehidupan yang lebih sejahtera dapat diraih. Caranya adalah sikap saling menolong, saling membantu, saling bersilaturahmi, saling mengisi dan saling bersinergi.

Ketika berbicara mengenai kemiskinan, maka yang ditekankan adalah upaya perhatian, pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok miskin yang dilakukan oleh mereka yang terkategori sebagai kelompok mampu. Pihak yang dianggap mampu ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik secara individu maupun kelembagaan. Sehingga tingkat kemiskinan masyarakat dapat diminimalisir. Apabila kelompok mampu ini tidak mempedulikan nasib kaum miskin, maka mereka disebut sebagai pendusta agama.³⁵ Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Al Maun : 1-3.



“(1) tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?. (2) itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. (3) dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.” (QS. Al Maun: 1-3)³⁶

Ali bin Abi Thalib menjelaskan terdapat lima pilar penting yang dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat menurut Islam antara lain: (1) ilmu para ulama, (2) pemerintah yang adil, (3) kedermawanan kelompok orang-orang kaya, (4) doanya orang-

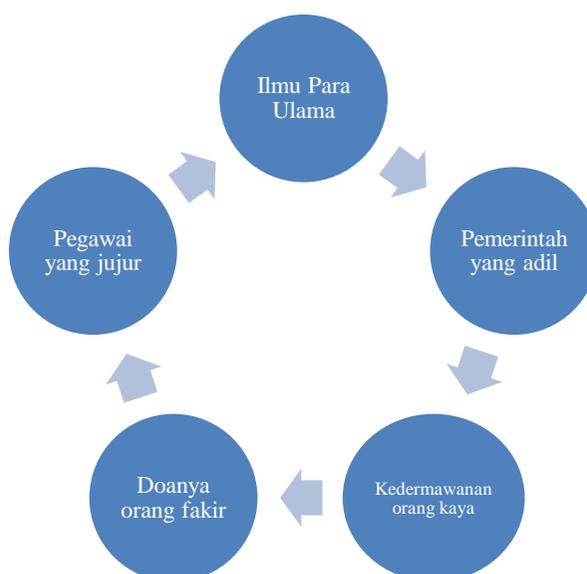
³⁵Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2000), 70.

³⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syamil Alquran dan terjemah perkata*, 602.

orang fakir, dan (5) kejujuran para pegawai. Dengan demikian Ali bin Abi Thalib menjadikan orang fakir miskin memiliki akhlak yang baik (dicirikan dengan suka berdoa) sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu masyarakat.³⁷

Gambar 2.2

Lima Faktor Tegaknya Urusan Dunia dan Masyarakat



Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip terkait kebijakan publik yang dapat dijadikan panduan bagi program pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan pekerjaan,³⁸ yaitu:

- a. Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang member manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor growth*) melalui dua cara yaitu pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor riil.

³⁷Irfan Syauqi Beik dan Dwi Arsyianti Laily., *Ekonomi Pembangunan Syariah*, 71.

³⁸Retno Wuri, *Kemiskinan: Bagaimana Islam Memandangnya*, 5.

- b. Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak kepada kepentingan masyarakat banyak (*pro-poor budgeting*). Dalam sejarah Islam terdapat tiga prinsip utama dalam mencapai *pro-poor budgeting*, yaitu kebijakan fiskal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penggunaan anggaran negara sepenuhnya untuk kepentingan publik atau efisiensi anggaran.
- c. Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang member manfaat luas bagi masyarakat (*pro-poor infrastructure*) sehingga memiliki dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian.
- d. Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas (*pro-poor public service*). Terdapat tiga bidang pelayanan publik yang harus mendapat perhatian serius yaitu: birokrasi, pendidikan dan kesehatan.
- e. Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak masyarakat miskin (*pro-poor income distribution*). Terdapat empat instrumen utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam yaitu:
 - 1) Zakat

Dalam Islam Allah memposisikan zakat sebagai poros utama bersama dengan shalat. Tanpa membayarkan zakat seseorang tidak dapat dianggap masuk dalam kelompok orang yang beriman dan telah dijanjikan oleh Allah kemenangan, surge firdaus, serta kabar gembira

bagi orang-orang yang membayarkan zakat.³⁹ Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Mukminun yaitu:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

“*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman (1), yaitu orang-orang yang khusu' dalam sembahyangnya (2), dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbutan dan perkataan) yang tiada berguna (3), dan orang-orang yang menunaikan zakat (4).*” QS. Al Mukminun: 1-4.⁴⁰

Begitu besar janji Allah bagi orang yang membayar zakat oleh karena itu zakat menjadi satu kunci untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini karena kewajiban membayar zakat merupakan poros utama dalam sistem keuangan Islam (fiskal), dan sesuai dengan prinsip distribusi kekayaan dalam Islam.⁴¹

Zakat adalah infaq yang bersifat wajib dan merupakan ibadah. Tetap dalam konteks ekonomi, zakat merupakan salah satu bentuk distribusi kekayaan (*tauzi'u al-tsarwah*) diantara manusia. Menurut M.A Mannan zakat sangat tepat dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam rangka mensejahterakan umat. Sebab menurut beliau salah satu kejahatan terbesar dari

³⁹Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, hlm 93.

⁴⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Syamil Alquran dan terjemah perkata*, hlm 313.

⁴¹Ruslan Abdul Ghafur. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Pustaka Pelajar” Yogyakarta, 2013), hlm 98.

kapitalisme adalah adanya penguasaan harta kekayaan oleh segelintir orang saja.⁴²

2) Infak

Infak atau sedekah merupakan pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah yang tertentu yang dilakukan dengan mengharap ridho dari Allah SWT. Infak dan sedekah dapat berupa material (uang, barang) dan juga dapat berupa non material (keahlian). Infak yang berupa keahlian dapat diberikan menurut profesinya seperti kepada lembaga pendidikan SD/SMP/SMA/Perguruan Tinggi bagi mereka yang berprofesi sebagai guru.⁴³

Rekonstruksi infak dan sedekah profesi tersebut secara langsung dapat meningkatkan kemanfaatan lebih besar dari sekedar infak materiil berupa uang atau barang yang biasa dilakukan, sebab dapat mewujudkan kualitas manusia yang lebih baik melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, hukum maupun yang lainnya secara gratis dan berkelanjutan.⁴⁴

3) Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *wakif* yang merupakan bentuk masdar dari kata *waqafa* yang berarti berhenti.⁴⁵ Wakaf merupakan suatu jenis pemberian (barang atau kepemilikan) untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum. Cara

⁴²Nur Rianto. *Teori Makro Ekonomi Islam Konsep, Teori dan Analisis*, Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 247.

⁴³Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), 194.

⁴⁴Ruslan Abdul Ghafur. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, 122.

⁴⁵Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 42.

menanggulangi kemiskinan tidak hanya dengan zakat namun juga bisa berupa wakaf yaitu dengan pengembangan kelembagaan (*institutional building*), akses, kesejahteraan (*welfare*), penyadaran (*conszientization*), dan partisipasi politik (*political participation*).

Pemanfaatan harta wakaf untuk kepentingan masyarakat dapat dilihat dari keberadaan harta wakaf yang digunakan untuk pendidikan, ekonomi, dan kegiatan sosial. Secara ekonomi, harta wakaf dapat juga untuk meningkatkan keterampilan masyarakat miskin, seperti dengan mendirikan lembaga pendidika dan pelatihan, rumah sakit, lembaga keuangan mikro, bank wakaf dan lain sebagainya dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat agar dapat bersaing pada lapangan kerja dan terentaskan dari kemiskinan.⁴⁶

4) Waris

Harta waris merupakan harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya.⁴⁷ Besaran jumlah harta waris yang diberikan kepada setiap keluarga berbeda-beda tergantung seberapa besar tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing individu dalam setiap keluarga, terutama keinginan agar tercipta keadilan dalam pembagian harta waris. Hal ini sejalan dengan konsep ekonomi Islam bahwa harta harus tersebar di masyarakat dan bukan terkumpul pada satu atau dua orang saja. Konsep waris Islam merupakan mekanisme distribusi kekayaan dan jaminan sosial riil dalam keluarga. Distribusi kekayaan yang secara adil melalui waris ini

⁴⁶Ruslan Abdul Ghafur. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, 112.

⁴⁷Irfan Syauqi Beik dan Dwi Arsyianti Laily., *Ekonomi Pembangunan Syariah*, 110.

menjadi motivasi kepada pewaris untuk tidak meninggalkan keturunannya dalam keadaan miskin.⁴⁸

C. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Kesimpulan
1.	Muhammad Burhanudin	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten Periode 2008-2013.	Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh persamaan sebagai berikut: $TP = 09,0116 + 5,6047E-07 * PDRB - 3,0474E-06 * UMK - 1,690647 * IPM + e$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen (PDRB, UMK dan IPM) berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen (TP). Dimana, koefisien determinasi/ R square = 0,607744. Hal ini berarti bahwa 60,77% Tingkat Pengangguran (TP) di Provinsi Banten dapat dijelaskan oleh Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota

⁴⁸Ruslan Abdul Ghafur. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, 117.

			(UMK) dan Indeks Pembangunan manusia (IPM), sedangkan sisanya yaitu 39,23% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.
2.	Apriliyah S. Napitupulu	Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Sumatra Utara.	<p>Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh persamaan sebagai berikut: $Y = 23891,74 - 1,170998X_1 - 1,447404X_2 - 0,167225X_3$.</p> <p>Dapat dikatakan bahwa Angka Harapan Hidup (X1), Angka Melek Huruf (X2), dan Konsumsi Perkapita (X3) secara bersama-sama berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin (Y). Dimana koefisien determinasi/ R square = 0,98.</p> <p>Artinya, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, dan Konsumsi Perkapita secara bersama-sama mampu memberikan penjelasan terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin sebesar 98%.</p>

3.	Devianti Patta	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010.	<p>Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh persamaan sebagai berikut: $Y = 68,663 + 0,709 X_1 - 0,299X_2 + 0,371X_3 + 0,422X_4 + 0,818X_5 + e$.</p> <p>Dapat dikatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Persentase Penduduk Miskin (X_2), Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan (X_3), Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan (X_4) dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan (X_5), secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Y).</p> <p>Dimana koefisien determinasi/ R square = 0,989.</p> <p>Artinya, variasi variabel dependen (Y) dalam hal ini Indeks Pembangunan Manusia dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Persentase Penduduk Miskin (X_2),</p>
----	-------------------	--	---

			Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan (X_3), Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan (X_4) dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan (X_5) sebesar 98,90% dan sisanya yakni 1,10% dijelaskan oleh variabel lain.
--	--	--	---

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. Menurut para ahli pengertian hipotesis adalah hubungan antara dua variabel atau lebih.⁴⁹

Dibawah ini adalah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

Ho: Diduga Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh negatif terhadap tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Banten.

Ha: Diduga Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Banten.

⁴⁹ Sofyan Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 38.